

cakrawala pemilu

Sumbu Informasi Pilkada 2024

Edisi 2/2024
jabar.kpu.go.id



Liputan Khusus 4-9
Adu Gagasan Bukan Sisindiran

Sinergitas 14-17
Gaspol Sosialisasi

Intermezzo 20-21
Sekejap Paham Sirekap

DAFTAR ISI



LAPORAN KHUSUS 4

ADU GAGASAN BUKAN 'SISINDIRAN'

DEBAT Pilgub Jabar 2024 bakal berlangsung tiga kali di tiga Kota. Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi berharap tak jadi ajang 'sisindiran' tapi adu ide dan gagasan.



SINERGITAS 14

GASPOL SOSIALISASI

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) kian masif melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hampir seluruh elemen masyarakat dari 27 kabupaten/kota dirangkul.



cakrawala pemilu
Sumbu Informasi Pilkada 2024

Kabar **KPU 10**
Jabar Ramah Disabilitas

Warta **Daerah 18**
Podcast Politik Asyik di Cirebon

Edukasi **22**
Politik dalam Genggaman

Opini **23**
Antara Dana Kampanye dan Integritas



INTERMEZZO 20

SEKEJAP PAHAM SIREKAP

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumumkan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

SHARE YOUR WORK...

Dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini dipastikan kian mempermudah semua aktivitas manusia sehari-hari tanpa terkecuali peran kehumasan dalam setiap organisasi termasuk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Jabar.

Tapi, kondisi faktual global tersebut belum sepenuhnya linier dengan kerja-kerja kehumasan di Kabupaten/Kota.

Secara sederhana bisa dianggap bahwa Kehumasan merupakan jembatan antara organisasi dan publik. Di KPU, Kehumasan berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi pemilih serta membangun citra positif lembaga.

Kerja kehumasan yang efektif bisa memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, transparan dan tepat.

Tapi, kerja-kerja kehumasan bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi juga tentang membangun hubungan dan kepercayaan (trust) dengan publik.

Terlebih, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memegang peran penting dalam menjaga dan menjunjung tinggi prinsip penyelenggara Pemilu sehingga diperlukan pendisiplinan diri yang dilakukan oleh seluruh komponen di dalamnya. Inilah yang membuat peran kehumasan sangat vital, terutama menjelang Pilkada serentak 2024.

Bila kita membaca buku yang ditulis oleh Austin Kleon berjudul "Show Your Work" sebenarnya bisa menjalankan tugas-tugas sebagai seorang Public Relation (PR) yang baik dengan membagikan sedikit pekerjaan kita untuk membangun audiens dan kekerabatan.

Itu artinya, menurut Kleon setiap individu itu sebenarnya bisa menjadi humas yang mumpuni dengan cara sederhana yakni dengan membagikan apa yang tengah dikerjakan oleh para komisioner KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tahapan Pilkada.

Dengan memanfaatkan media sosial, setiap KPU Kabupaten/Kota (komisioner dan sekretariat) dapat membagikan informasi terkait kegiatan KPU, proses penyelenggaraan tahapan Pilkada, hingga sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU (PKPU)nya.

Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain : berbagi cerita di balik layar. Dalam hal ini para ketua divisi yang membidangi Sokdiklih Parmas (Sosialisasi Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat) bisa menampilkan proses kerja KPU, tantangan yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

Bagikanlah sedikit demiki sedikit perjalanan dalam menjalankan tugasnya semisal membagikan foto atau video pendek saat KPU Kabupaten/Kota sedang melakukan

sosialisasi tahapan yang dikerjakan.

Selain itu, membuat konten yang menarik. Untuk ini, karya yang dibuat harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan target pemilih yang disasar dari pesan yang hendak disampaikan, visual yang menarik, dan format yang variatif untuk menyampaikan informasi.

Interaksi dengan publik pun perlu dilakukan dengan cara merespons terhadap komentar dan pertanyaan dari masyarakat, serta aktif mengikuti diskusi di media sosial. Jangan lupa pula menguasai isu-isu terkini dengan menyampaikan pesan-pesan KPU dalam konteks isu-isu sosial dan politik yang sedang hangat diperbincangkan.

Tentu, itu saja tidak cukup. Karena tak kalah pentingnya lagi adalah memahami informasi terkait Pilkada secara menyeluruh. Seluruh individu yang ada di KPU harus menguasai detail seperti jadwal, prosedur dan peraturan Pilkada.

Pasalnya, aturan merupakan fondasi dari perhelatan Pilkada. Memahami aturan berarti mengetahui hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat termasuk pemilih, peserta pemilihan (kandidat) dan penyelenggara.

Oleh karenanya, anggota KPU dan jajaran sekretariatnya harus dapat memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menghindari permasalahan hukum dan menegakkan prinsip keadilan dan transparansi.

Ini akan memastikan bahwa setiap pesan yang kita sampaikan kepada publik akurat dan diandalkan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan bisa dipercaya selain memang informatif.

Dengan menguasai informasi, memanfaatkan media sosial secara efektif, berinteraksi dengan publik dan menjaga transparansi kita bisa memastikan bahwa informasi penting mengenai Pilkada sampai dan dipahami oleh publik dengan baik.

Harapan kita semua bahwa pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lancar bila ada partisipasi pemilih dan aturan yang dipatuhi oleh seluruh peserta dan penyelenggara pemilihan. Sekali lagi, Austin Kleon lewat karyanya sudah mengingatkan kita "Don't be a hoarder. Don't keep it all to yourself. Share your work."

Oleh karena itu, demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada, bagikanlah pekerjaan kita untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan publik sebagai pemilik kedaulatan republik ini. *Viva la democratia!*

Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar



KPU Jabar Gelar Debat Pilgub di 3 Kota

ADU GAGASAN BUKAN 'SISINDIRAN'

DEBAT Pilgub Jabar 2024 bakal berlangsung tiga kali di tiga Kota. Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi berharap tak jadi ajang 'sisindiran' tapi adu ide dan gagasan.

Hakikatnya, dia mengharapkan debat yang berlangsung pada 11, 17, dan 23 November 2024 itu bisa menjadi kesempatan mendekatkan diri kepada para calon pemilih.

Selain berisi visi misi unggulan, debat Pilgub Jabar yang dilaksanakan di Bogor, Bandung, serta Cirebon, diharapkan menjadi media untuk menyebarkan wawasan yang dimiliki setiap calon.

"Debat itu harus menampilkan kualitas. Para calon

harus memanfaatkan ajang itu untuk beradu argumen dan gagasan. Jangan seperti debat Pilgub Jakarta kemarin yang hanya terlihat seperti candaan dan sisindiran saja," kata Muradi.

Kendati medium untuk menyebarluaskan visi dan misi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun forum debat diakuinya penting dilakukan. Pasalnya, dalam perdebatan itu sejatinya merepresentasikan setiap kontestan di hadapan para calon pemilih.



Debat calon itu tak penting dilakukan dimana. Esensinya, debat itu menguji visi misi dan program yang diusulkan setiap calon. Dan jalannya perdebatan itu bisa menunjukkan kualitas si calon."

Muradi

Pengamat Politik Unpad

Muradi mengakui debat diadakan untuk menguji setiap program yang menjadi unggulan setiap pasangan calon. Meski demikian, peserta debat diharapkan jangan asal ngomong saja. Lebih baik, setiap ide dan gagasan yang ditampilkan itu disertai data dan fakta di lapangan.

Kecenderungan penggunaan data itu diperlukan untuk ajang debat sebagai arena menguji probabilitas yang ujungnya diperlukan sebagai acuan pengambilan keputusan.

"Untuk menguji probabilitas itu harus berdebat. Makanya, debat calon itu perlu ada," tegasnya seraya menyebutkan debat calon itu pun bisa menjadi ajang untuk menunjukkan kelayakan sebagai pemimpin.

Disinggung mengenai debat yang dilakukan sebanyak tiga kali di daerah berganti-ganti, Muradi mengaku skema tersebut hanya sebatas simbolik. Toh,


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

JADWAL DEBAT PILGUB JABAR 2024

11 November 2024	17 November 2024	23 November 2024
KOTA BANDUNG TEMA SDM, PENDIDIKAN, KELANJUTAN REFORMASI BIROKRASI	KABUPATEN CIREBON TEMA INDUSTRI KREATIF, LINGKUNGAN, BUDAYA, MODERASI AGAMA	KABUPATEN BOGOR TEMA PEMBANGUNAN, LAYANAN PUBLIK, INFRASTRUKTUR





saat ini siaran debat itu bisa diakses dimana pun dan kapan pun.

"Debat calon itu tak penting dilakukan dimana. Esensinya, debat itu

menguji visi misi dan program yang diusulkan setiap calon. Dan jalannya perdebatan itu bisa menunjukkan kualitas si calon," jelasnya.



VISI MISI 4 PASLON DI PILGUB JABAR 2024



1

**ACEP ADANG RUHIYAT
GITALIS DWI NATARINA**

1. Membangun masyarakat Pancasila yang bertaqwa dan berakhlak mulia melalui penguatan peran masjid, rumah badah, lembaga pendidikan agama dan komunitas keagamaan sebagai pusat peradaban.
2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, bahagia dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan inovatif.
3. Mempercepat pembangunan wilayah berbasis lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan ata ruang yang mendukung keseimbangan alam dan memberikan kebahagiaan bag semua lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi yang adil dan sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan partisipatif dengan kepemimpinan yang kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.



2

**JEJE WIRADINATA
RONAL SURAPRADJA**

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

VISI MISI 4 PASLON DI PILGUB JABAR 2024



3

**AHMAD SYAIKHU
ILHAM HABIBIE**

1. Membangun kualitas manusia masyarakat Jawa Barat yang beriman dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.
2. Membangun keluarga tangguh sejahtera sebagai pilar elemen masyarakat Jawa Barat.
3. Memastikan kesejahteraan sosial yang merata dalam bentuk memperluas akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan absolut di Jawa Barat.
4. Membangun ekonomi Jawa Barat yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan penguatan potensi desa, kota dan pesisir.
5. Membangun wilayah dengan kebijakan tata ruang yang optimal untuk kota, desa dan pesisir Jawa Barat.
6. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik.
8. Penyelarasan hidup masyarakat Jawa Barat dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.



4

**DEDI MULYADI
ERWAN SETIAWAN**

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana.
4. Pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance).



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**



Swing Voters Sasaran 'Seksi'

Lebih jauh, Muradi menjelaskan keterkaitan debat calon terhadap tingkat partisipasi pemilih. Terutama, bagi para calon pemilih yang sifatnya 'mengambang', bukan hasil mobilisasi massa dari parpol atau para simpatisan.

Muradi menjelaskan, terkait *swing voters* itu kecenderungannya mereka yang tergolong gen Z. Kalau sasarannya gen Z, skema debat kandidat diakuinya relatif tidak efektif.

"Soalnya, mereka gen Z dan anak muda kebanyakan itu kan banyak

magernya. Jadi, skema yang lebih baik ditempuh itu dengan menggunakan media sosial. Mereka lebih banyak mengakses media digital. Tapi, masalahnya, apakah KPU punya data terkait sebaran gen Z itu?" tuturnya.

Meski demikian, dia menegaskan debat kandidat itu relatif bisa mempengaruhi pilihan masyarakat saat menggunakan hak suaranya. Setidaknya, sekitar 10-20 persen calon pemilih akan mempertimbangkan hasil gelaran debat.

Untuk itu, kepada masing-masing pasangan calon yang akan bertarung

pada Pilgub Jabar 2024 itu harus serius menghadapi debat yang digelar KPU Jabar. Setidaknya, saat debat berlangsung setiap kandidat jangan asal ngomong. Sebab, apa yang terjadi dalam debat itu memberikan gambaran kualitas kepada audiens.

Secara umum, Muradi mewanti-wanti kepada setiap kandidat untuk bisa menangkap apa yang diinginkan warag Jabar ke depan. Prinsip utamanya, saat debat nanti setiap calon harus bisa menawarkan gagasan yang lebih baik untuk Jabar.

"Selain itu, masing-masing calon pun kudu bisa membangun daya tawar politik Jabar di mata pemerintah pusat. Sebagai pembangunan daerah, Jabar harus memiliki stimulan mengembangkan daerahnya untuk investasi. Bagaimana caranya, agar investasi yang ditanam di Jabar tidak lari ke provinsi lain. Intinya, dalam hal ini konteksnya '*kahoyongna warga Jabar teh naon sih*,'" jelasnya.

Muradi mengharapkan kepada masyarakat yang memiliki hak suara untuk menunaikan sebaik-baiknya. Se jauh

ini, kecenderungan pemilih di Jabar itu tertumpu pada dua hal. Selain sosok individu, pemilih di Jabar juga masih melihat parpol yang mengusungnya.

“Untuk itu, setiap calon harus bisa menjelaskan visi dan misi yang diusung sejelas-jelasnya pada debat kandidat nanti. Apalagi, orang Jabar itu sifatnya gak mau mendukung yang kalah,” ujar Muradi.

Materi Selaras Pembangunan Jabar

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni bicara soal materi debat Pilgub 2024. Rupanya, melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dan disabilitas sebagai narasumber.

Menurut Ummi, Bappeda dan perwakilan disabilitas terlibat dalam *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Rabu 9 Oktober 2024. Hadir pula lima tim perumus dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat.

Harapannya, enam materi debat yang dibagi pada tiga kali pelaksanaannya di 11, 17 dan 23 November 2024 mendatang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan Provinsi Jawa Barat ke depan.

“Dari Bappeda lebih ke menyelaraskan dan berkesinambungan terkait dengan RPJMD di Jawa Barat. Kemudian disabilitas, terkait hak-hak dari 36 hak disabilitas,” ujar Ummi.

Semua masukan lanjut dia, dibagi dalam enam tema yang dirumuskan oleh tim perumus.

Sementara Tim Perumus Yusufitriadi mengatakan, materi visi dan misi para pasangan calon harus selaras dengan kerangka pembangunan provinsi yang telah direncanakan. Baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

“Semua aspek tentang pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur sinkronisasi pusat dan daerah, pertanian termasuk inklusivitas pelibatan program,” paparnya.

Sedangkan Tim Perumus Ramadhan Pancasilawan melanjutkan, semua tema dibedah sesuai materi yang dirancang.

Dengan persiapan ini, KPU Jabar berharap debat calon gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan dengan baik, mendalam dan mencakup isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan dan kesejahteraan di Jabar.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

(Sosdiklihparmas) KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, pada debat Pilgub nanti bisa disisipi pertanyaan langsung dari masyarakat atau pun organisasi.

“Kalau masyarakat mau titip pertanyaan, silakan. Bisa sampaikan ke kami, asal disertai dengan KTP dan keterangan identitas yang jelas,” ujar Hedi.

Adapun pertanyaan yang masuk dari masyarakat maupun organisasi, kata Hedi, akan disaring terlebih dahulu sesuai kebutuhan.

“Sejauh ini sudah lumayan (banyak) masukan dari masyarakat, terutama lembaga titip pertanyaan untuk debat. Menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam debat. Kami menerima pertanyaan hingga H-3 debat,” ucapnya.

Pertanyaan yang dianggap relevan akan dimasukkan sebagai bahan pertanyaan kepada paslon saat debat berlangsung.

“Kemudian kami harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Sebelum menetapkan tema setiap debat,” katanya.

“Itu harus kita perhatikan, sehingga debat yang berlangsung sesuai kebutuhan dan pembangunan yang akan dilakukan Gubernur Jabar lima tahun mendatang,” tambahnya. (*)

SELAIN gelaran debat, Pilgub Jabar juga masuk tahapan kampanye akbar bagi 4 pasangan calon (Paslon) yang bertarung. Ada pesan penting dari Pj Gubernur Bey Machmudin.

Titah itu dilontarkan Bey dalam Deklarasi Kampanye Berintegritas dengan tema Regreug Pageuh, Repah Rapih di Kota Bandung, 6 Oktober 2024 lalu.

enurut Bey, deklarasi tersebut menjadi langkah penting dan strategis untuk memastikan pelaksanaan kampanye Pilkada Jabar 2024 berjalan jujur, adil dan beretika.

“Pemilihan (Kepala Daerah) 2024 merupakan momentum penting bagi masa depan Jawa Barat. Deklarasi kampanye berintegritas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kampanye berjalan jujur, adil, dan beretika,” ucap Bey.

Bey juga menyatakan, selama masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung, semua pihak mulai dari KPU Jabar, Bawaslu Jabar, pasangan calon (paslon), tim pemenang hingga masyarakat harus menjaga integritas.

“Saya mengajak masyarakat menolak politik uang dan politisasi SARA. Pemilu harus menjadi ajang adu gagasan,



WUJUDKAN DEMOKRASI DAMAI

an, bukan ajang perpecahan. Selain itu, mari kita lawan hoaks dan ujaran kebencian, serta memastikan informasi yang kita sebar adalah benar dan akurat,” sambungnya.

Melalui deklarasi tersebut, Bey meyakini, semua pihak akan bahu-membahu mewujudkan Pilkada Jabar 2024 yang damai dan berintegritas.

“Deklarasi ini adalah komitmen moral kita untuk mewujudkan pemilu damai dan berintegritas. Mari kita tunjukkan bahwa Jawa Barat mampu

menjadi contoh dalam demokrasi yang sehat,” tuturnya.

Di sisi lain, KPU sendiri telah menetapkan lokasi kampanye akbar Pilkada Jabar 2024. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, mengatakan para peserta Pilkada Jabar telah mengajukan lokasi dan waktu yang diinginkan pada KPU, sesuai SK 46 tahun 2024 yang diterbitkan 1 Oktober 2024.

Hedi menerangkan bahwa masing-masing pasangan calon mendapatkan dua kali kesempatan untuk melakukan kampanye akbar Pilkada Jabar 2024 sesuai pilihannya.

Dia merinci, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina, akan melakukan kampanye akbar di Kota Tasikmalaya pada 10 November 2024 dan Kota Bandung pada 17 November 2024.

Lalu, pasangan nomor urut 2, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, akan melakukannya di Kabupaten Pangandaran pada 10 November 2024 dan Kota Bandung pada 16 November 2024. (*)



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT			
JADWAL KAMPANYE AKBAR 4 PASLON PILGUB 2024			
1 ACEP ADANG RUHIAT GITALIS DWI NATARINA	2 JEJE WIRADINATA RONAL SURAPRADJA	3 AHMAD SYAIKHU ILHAM AKBAR HABIBIE	4 DEDI MULYADI ERWAN SETIAWAN
10 November 2024 KOTA TASIKMALAYA	10 November 2024 KAB PANGANDARAN	10 November 2024 KOTA BANDUNG	20 November 2024 KAB INDRAMAYU
17 November 2024 KOTA BANDUNG	16 November 2024 KOTA BANDUNG	23 November 2024 KOTA BEKASI	22 November 2024 KABUPATEN BOGOR

JABAR RAMAH DISABILITAS

PILKADA Serentak 2024 di Jawa Barat ramah disabilitas. Bukan sekadar slogan dan kata-kata. Aksi serta program nyata diluncurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

su disabilitas selalu menjadi fenomena menarik dalam dua dekade pesta demokrasi di Indonesia. Tentu saja, kaitannya pada substansi pelayanan serta pemenuhan hak suara untuk kelompok rentan di setiap periode kontestasi Pemilu ataupun Pilkada.

Pemenuhan hak politik bagi disabilitas yaitu hak dipilih dan hak memilih. Secara konstitusi, hak politik disabilitas dilindungi dan diakui keberadaannya melalui ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) pada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia. Berikut halnya diperkuat melalui Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

KPU Jabar pun menerjemahkan hal di atas dengan sebuah semangat pemenuhan hak-hak para kaum difabel di Pilkada 2024 serentak mendatang. Tak sekadar semangat, lantaran sudah diluncurkan beberapa keputusan yang bermuara pada suatu misi mulia, membuat kaum disabilitas bisa memilih dengan rasa nyaman.

Ketua Divisi Perencanaan dan Logis-

tik KPU Provinsi Jabar, Hari Nazarudin mengungkapkan, komitmen KPU Jabar untuk menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas dalam persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota 2024.

Hari mengatakan bahwa sejak tahap perencanaan, KPU telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kelompok disabilitas.

“Untuk kelompok tunanetra, setiap TPS diwajibkan menyediakan template atau alat bantu yang sesuai,” ujar Hari usai acara Bimtek Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu, di Grand Hotel Preanger Kota Bandung, Jumat 11 Oktober 2024 lalu.

Untuk itu, Hari menekankan pentingnya aksesibilitas lokasi TPS, memastikan bahwa semua TPS berada di tempat yang mudah dijangkau.

Selain itu, KPU Jabar juga akan menyiapkan Petugas Pelayanan (POM) khusus yang bertugas membantu pemilih disabilitas dan lansia.

“Kami ingin memastikan bahwa semua pemilih, termasuk yang membutuhkan bantuan, dapat memberikan suara mereka dengan nyaman,” tambahnya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jaba, Hedi Ardi, menambahkan keluhan para penyandang disabilitas soal perhatian dari para petugas pada Pemilu ataupun Pilkada sebelumnya, turut melatar belakangi KPU Jabar dalam merancang berbagai program strategis.

Ia mengatakan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, baik KPU Jabar, maupun kota/kabupaten untuk meningkatkan pelayanan khususnya kepada penyandang disabilitas.

“Ini PR bagi kami, bagaimana membuat KPPS nanti yang bertugas di TPS ramah terhadap disabilitas. Kadang di lapangan disamaratakan perlakuannya. Padahal berbeda. Perlu jiwa pelayan dikedepankan oleh petugas KPPS,” ucapnya, Kamis (4/10/2024).

Untuk itu Hedi memastikan TPS ramah disabilitas adalah hal penting pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)



PILKADA 2024 JABAR DALAM ANGKA

Daftar Pemilih Tetap

35.925.960

Pemilih Disabilitas di Jabar

118.975

Total Jumlah TPS di Jabar

73.862

Jabar 2024 mendatang.

“Sehingga ketika tahu ada disabilitas di area yang akan dibangun TPS, maka seharusnya dibangun TPS yang ramah terhadap mereka. Harus memudahkan mereka masuk ke TPS. Ini yang seringkali kurang diperhatikan, termasuk juga kemampuan berkomunikasi dan melayani disabilitas,” katanya.

Ia mengatakan, Pilkada Serentak 2024 yang ramah disabilitas ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, baik KPU Jabar, maupun kota/kabupaten. Tentu saja, yang perlu diperhatikan adalah pelayanan khusus kepada penyandang disabilitas.

“Ini PR bagi kami, bagaimana membuat KPPS nanti yang bertugas di TPS ramah terhadap disabilitas. Kadang di lapangan disamaratakan perlakuannya. Padahal berbeda. Perlu jiwa pelayan dikedepankan oleh petugas KPPS,” ucapnya.

Untuk itu Hedi memastikan TPS ramah disabilitas adalah hal penting pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2024 mendatang.

“Sehingga ketika tahu ada disabilitas di area yang akan dibangun TPS, maka seharusnya dibangun TPS yang ramah terhadap mereka. Harus memudahkan mereka masuk ke TPS. Ini yang



seringkali kurang diperhatikan, termasuk juga kemampuan berkomunikasi dan melayani disabilitas,” katanya.

Selain persoalan pemenuhan hak-hak memilih kaum disabilitas, KPU Jabar juga memperhitungkan potensi bencana di beberapa daerah yang masuk kategori rawan terutama pada pelaksanaan pemungutan suara, 27 November 2024 mendatang.

Logistik Jangkau Pelosok

Tak hanya soal TPS yang ramah disabilitas, KPU Jabar juga menggeber pendistribusian logistic jelang Pilkada Serentak 2024. Mereka menyiapkan langkah mitigasi sebagai antisipasi terjadinya bencana ataupun cuaca ekstrem.

“Distribusi logistik dilakukan saat musim hujan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Distribusi harus menjangkau wilayah pegunungan, dataran dan pesisir,” ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin, Minggu 13 Oktober 2024.

Dengan strategi yang matang, KPU Jabar berharap pendistribusian logistik dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan optimal. Proses distribusi dimulai dari penyedia hingga ke TPS.

“Kami telah menyiapkan strategi untuk memastikan distribusi berjalan lancar, meskipun di daerah pelosok,” jelasnya.

Menghadapi potensi keadaan darurat seperti bencana atau cuaca buruk, KPU Jabar juga telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Dia mengakui Distribusi akan dilakukan KPU kabupaten dan kota. KPU Jawa Barat menyiapkan strategi agar prosesnya berjalan lancar.

“KPU Jabar telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kami harus memitigasi hal-hal yang harus diantisipasi, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda,” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni mengapresiasi pengelolaan



logistic KPU Kabupaten Ciamis. Pasalnya, KPU Kabupaten Ciamis sudah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk PPK dan PPS meski logistic masih dalam proses produksi.

Rapat Koordinasi KPU Ciamis terkait persiapan pengelolaan logistik pemilihan serentak 2024 di Aula Hotel Tyara, Kamis 17 Oktober 2024 lalu.

Umi mengungkapkan rasa bangga dan terimakasih kepada seluruh jajaran dan staff KPU Ciamis.

“Alhamdulillah saya berkesempatan hadir untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jajaran rekan-rekan KPU Kabupaten Ciamis dari mulai, ketua, serta seluruh jajaran sekretariat, PPK dan PPS, mari kita lanjutkan untuk

membuktikan kinerja kita dengan baik pada saat pelaksanaan Pilkada serentak nanti,” ucapnya.

Umi juga menuturkan jika penilaian KPU Ciamis terbaik di Jawa Barat.

“KPU Kabupaten Ciamis itu tidak ada cacatnya malah terbaik dari segi pendataan dan lainnya hingga bisa menjadi contoh bagi yang lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Ummi Wahyuni juga menghadiri Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat 11 Oktber 202.

Ummi mengatakan, sedikitnya ada

sekitar 70 juta lembar surat suara yang harus disiapkan untuk pemilihan pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena kalau dihitung dengan jumlah DPT kita hampir 36 juta, artinya kalau dikalikan dua plus tambahannya, hampir 70 juta lembar surat suara yang akan kita siapkan untuk pemilihan di tanggal 27 November 2024,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ummi meminta jajarannya untuk segera melakukan pengadaan terkait dengan alat perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ataupun terkait logistik lainnya dari data yang sudah ditetapkan.

“Kami berharap dari data yang sudah kita tetapkan, temen-temen logistik melakukan pengadaan terkait dengan alat perlengkapan TPS ataupun terkait

logistik lainnya. Sehingga dalam hal ini kami sangat menganggap penting kegiatan ini,” katanya.

Selain itu, Ummi juga meminta upah untuk petugas sortir dan lipat (Sorlip) untuk segera ditetapkan.

“Dalam hal upah untuk Sorlip ini, kami menginginkan ketika nanti ada ketentuan yang dibuat oleh KPU dari satu-an kerja masing-masing, tetapi range harganya tidak terlalu jauh,” imbuhnya.

Dengan adanya kegiatan ini, kata Ummi, diharapkan upah Sorlip, manajemen logistik, kemudian distribusi logistik bisa dibahas dengan baik.

“Jangan sampai nanti keterkaitan anggaran yang kita gunakan ini juga menjadi blunder bagi kita terkait dengan persiapan anggaran. Mudah-mudahan bisa secara optimal kita persiapkan,” tandasnya.

APK di 480 Titik

Di sisi lain, KPU Jabar telah menetapkan 480 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk Pilkada Serentak 2024.

Begitu disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Aneu Nursifah usai kegiatan ‘Rapat Koordinasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Serentak’ di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis 17 Oktober 2024 lalu.

“Sudah ada hampir 480 lebih titik lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye, di situ sudah ada di setiap kabupaten/kota, di kecamatan mana saja,” ucap Aneu.

Aneu memastikan, titik lokasi pemasangan APK ini sudah disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah.

“Itu sudah disesuaikan dengan masing-masing pemerintah daerah, jadi memperhatikan nilai estetika dan kebersihan juga,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan turun tangan dalam pembersihan APK. Namun, hal itu berlaku bagi APK yang disediakan oleh KPU Jabar.

“Kalau dulu biasanya pembersihan ini kewenangan Bawaslu ya, kalau sekarang di PKPU justru KPU yang berwe-

nang untuk melakukan pembersihan alat praga kampanye, tapi itu hanya alat praga kampanye yang disediakan oleh KPU saja,” katanya.

“Jadi APK yang disediakan oleh pasangan calon itu pembersihannya diserahkan ke pasangan calon,” lanjutnya.

Aneu mengatakan, tim kampanye dari setiap pasangan calon diperbolehkan untuk membuat APK diluar yang difasilitasi oleh KPU Jabar.

“Jadi ada beberapa hal yang boleh itu mencetak pakaian, penutup kepala bisa jadi kerudung, topi, alat makan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker paling besar dan atribut kampanye lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Aneu mengingatkan, harga setiap bahan kampanye tidak boleh melebihi dari angka Rp100 ribu.

“Tetapi setiap bahan kampanye itu harganya tidak boleh lebih dari Rp100 ribu, kalau dikonversikan dalam bentuk uang, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Adapun terkait larangan kampanye, kata Aneu, sesuai dengan peraturan tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila, menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan.

“Lalu melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, menggunakan kekerasan, ancaman, lalu mengganggu keamanan, mengancam dan menganjurkan menggunakan kekerasan, merusak dan atau menghilangkan APK, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah,” katanya.

“Lalu menggunakan tempat ibadah dan pendidikan, melakukan pawai dengan dilakukan jalan kaki, dengan kendaraan di jalan raya, dan melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU,” tambahnya.

Terkait dengan kampanye di lembaga pendidikan, Aneu mengatakan bahwa peraturan ini ada yang dikecualikan.

“Jadi perguruan tinggi boleh dipakai asal dengan izin dan tanpa atribut kampanye. Kemudian dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu untuk di perguruan tinggi,” tandasnya. (*)



GASPOL SOSIALISASI

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) kian masif melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hampir seluruh elemen masyarakat dari 27 kabupaten/kota dirangkul.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan bahwa pemilih muda merupakan kelompok pemilih terbesar di Jabar. Dengan lebih dari 35 juta daftar pemilih tetap (DPT), partisipasi pemilih muda

akan sangat menentukan keberhasilan Pilkada ini.

“Kami berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga turut memverifikasi status DPT mereka melalui DPT Online. Pilkada yang

sukses adalah hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan yang berperan dalam edukasi pemilih,” ucap Ummi saat sosialisasi pendidikan pemilih di Universitas Mayasari Bakti Tasikmalaya, Jumat 4 Oktober 2024.

Sementara itu, Rektor Universitas Mayasari Bakti, Kholis M menekankan pentingnya kualitas Pilkada, baik dari sisi proses maupun hasil.

“Pilkada berkualitas ditentukan oleh tahapan yang berlangsung sesuai aturan serta hasil yang melahirkan pemimpin yang berkomitmen mense-



Kami berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga turut memverifikasi status DPT mereka melalui DPT Online. Pilkada yang sukses adalah hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan yang berperan dalam edukasi pemilih.”

Ummu Wahyuni
Ketua KPU Jabar

pentingnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti akan sukses jika didorong oleh peran aktif masyarakat dalam memilih dengan benar dan bijak,” ucap Abdul.

Abdul menegaskan bahwa Yayasan Firdaus Putra Derosa akan terus mendukung upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat dan siap berkolaborasi dengan KPU Jabar dalam menyukseskan Pilkada 2024.

Selain di Tasikmalaya dan Garut, sosialisasi ini juga digelar di Kota Bandung. KPU Jabar menggandeng Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jabar menyelenggarakan sosialisasi pendidikan pemilih di Pondok Pesantren Al-Munawwarah.

Ketua HIPSI Jabar, Dikdik Nurkholik menekankan pentingnya pemilih muda dalam menentukan masa depan daerah melalui Pilkada.

“Pemilih muda memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan di Jawa Barat. Suara kalian akan sangat berpengaruh dalam memben-

tuk kebijakan-kebijakan penting,” ucap Dikdik.

“Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada, terutama di kalangan pemilih pemula,” tambahnya.

Selain itu, Dikdik juga mengajak peserta untuk berkomitmen dalam menciptakan suasana demokrasi yang damai dan menjunjung tinggi persatuan.

“Meskipun kita memiliki pilihan yang berbeda, jangan biarkan perbedaan tersebut merusak silaturahmi yang sudah terjalin. Mari kita jaga kebersamaan demi kesuksesan Pilkada 2024,” tandasnya.

Dari Mahasiswa hingga Driver

Tak diragukan lagi, peran mahasiswa dalam mengelut kontestasi Pilkada Serentak 2024 tak bisa dipandang remeh. Peran mereka sebagai ‘agen perubahan’ sangatlah vital terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan generasi muda.

Maka KPU Jabar bersama Institut Tinggi Agama Tasikmalaya (IAIT) menggelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Tahun 2024 di Aula IAIT,

jahterakan masyarakat,” ungkapnya.

“Mahasiswa sebagai pemilih harus kritis dalam memilih, melihat rekam jejak calon, dan tidak hanya memilih berdasarkan hubungan emosional,” lanjutnya.

Kholis juga mengingatkan bahwa pemilu adalah wujud dari kebebasan demokrasi yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

“Jika pemilu tidak menghasilkan pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan, maka pemilu tersebut dianggap gagal,” ujarnya.

Bukan hanya di Tasikmalaya, KPU Jabar juga menggelar sosialisasi bersama Yayasan Firdaus Putra Derosa di GOR Padepokan Sinar Pusaka Putra, Kabupaten Garut.

Ketua Yayasan Firdaus Putra Derosa, Abdul Rauf Ro'yandari menekankan



Kamis 17 Oktober 2024

Kadiv SDM dan Litbang KPU Jabar, Abdul Sapi'i mengajak, mahasiswa untuk terlibat aktif sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya dengan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"KPU Provinsi Jawa Barat ingin mendorong rekan-rekan sekalian bukan sekedar objek untuk kita sosialisasi, tapi siapa pun pemilih yang sudah memenuhi syarat itu untuk menjadi penyelenggara pemilu, dari KPPS, BPS, PPK," ucap Abdul dalam sambutannya.

Menurutnya, generasi muda masih memiliki idealisme yang tinggi untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.

"Rekan-rekan sekalian kami min-

takan untuk menjadi agen sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat di sekitar kita, kita harapkan temen-temen menjadi agen penyambung lidah dan aspirasi kita," katanya.

Di tempat yang sama, Rektor IAI Tasikmalaya, Abdul Haris bersyukur IAIT menjadi bagian dari Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Tahun 2024.

"Kita semua dapat kesempatan untuk berdiskusi ataupun juga untuk mendengarkan pemaparan terkait pemilihan khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024 ini," ucap Haris.

Haris mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban untuk

menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada masyarakat.

"Agar kesadaran pemilih bukan sampai di telinga saja tetapi juga punya kewajiban untuk menggerakkan yang bisa digerakan paling tidak di lingkungan kita," ungkapnya.

Haris mengatakan bahwa Pilkada juga menjadi ajang untuk mengevaluasi kepemimpinan lima tahun kebelakang. Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk selektif dalam memilih calon pemimpin.

"Ini kesempatan untuk mencari alternatif agar kita mendapatkan atau juga memilih sosok calon gubernur dan wakilgubernur Jabar yang lebih ideal, yang lebih amanah dan juga dapat melaksanakan visi misinya untuk pemba-

ngunan Jawa Barat," katanya.

Di sisi lain, para pengemudi atau *driver* turut pula dilibatkan KPU Jabar dalam hal sosialisasi Pilkada Serentak 2024. Karena, pesta demokrasi haruslah memberikan peran kepada seluruh kalangan.

KPU Jabar menggandeng Perkumpulan Seluruh Pengemudi Bersatu menggelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Tahun 2024 di Sahejo Resort, Kabupaten Purwakarta, Kamis 17 Oktober 2024.

Divisi Teknis KPU Purwakarta, Rifan Dani Ramadhan menekankan, pentingnya pendidikan pemilih menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

"Hari ini kita sedang melaksanakan pesta demokrasi yang beberapa bulan lagi kita akan menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur," ucap Rifan dalam sambutannya.

Dengan adanya sosialisasi pendidikan pemilih ini, kata Rifan, diharapkan dapat menuntun masyarakat menjadi pemilih yang rasional dan cerdas dalam menentukan calon pemimpinnya.

"Saya harap kita juga jangan sampai buta atau anti terhadap politik, pendidikan pemilih ini sangat penting, bagaimana caranya mengedukasi memilih pemimpin yang baik seperti apa,

menganalisa pemimpin itu seperti apa," katanya.

"Dengan pendidikan ini nanti ke depan ibu-ibu bisa memberikan pelajaran politik kepada anak-anak tentang bagaimana cara memilih, karena waktunya sebentar lagi, mudah-mudahan bisa berjalan lancar," tambahnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Jabar, Asep Dani juga menekankan pentingnya pendidikan pemilih ini untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat di Pilgub Jabar 2024.

"Maka dari itu kita sebagai pemilih bentuk partisipasi agar bisa menentukan arah ke depan, agar pengemudi di kemudian hari dapat bekerja dengan tenang, bekerja dengan selamat membawa kendaraan dari satu tujuan ke tujuan yang lain," ucap Asep.

Demi Kesadaran Politik

Dari segala ikhtiar sosialisasi yang digelar KPU Jabar, tujuan utamanya jelas satu, kesadaran politik. Dari kesadaran politik itulah, partisipasi pemilih sejalan lurus hasilnya.

KPU Jabar menggandeng Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) dan Kelompok Wartawan (Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran politik.

Agenda bertajuk "Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024" itu dilaksanakan di Sekretariat Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Kamis, dengan peserta sebanyak 50 orang dari kalangan jurnalis dan anggota Prima DMI.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bogor Aprian Wahyudi menyebutkan, sosialisasi ini dilakukan untuk lebih mengedukasi warga dalam pemahaman mengenai Pilkada serentak di Jawa Barat, termasuk di Bumi Tegar Beriman.

Menurut dia, pada acara sosialisasi ini juga diharapkan para jurnalis yang mempunyai tugas fungsi sebagai pilar keempat demokrasi, bisa ikut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluk beluk pilkada dalam pemilihan pemula.

"Kami harapkan para jurnalis bisa ikut membantu kami dalam menyosialisasikan kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki target partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini sebanyak 85 persen.

"Tentunya ini perlu kerja sama antara pemerintah, penyelenggara, Prima DMI dan Pokwan, agar partisipasi ini bisa mencapai target," katanya.

Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saeful Ramadhan mengajak jurnalis di Bumi Tegar Beriman untuk ikut menyosialisasikan Pilkada dengan catatan independen.

Pemilih di Kabupaten Bogor pada 27 November 2024 dijadwalkan akan memberikan suara dalam Pilkada untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

Terdapat empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yakni Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhul-Ilham Akbar, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

Dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor adalah Rudy Susmanto-Ade Ruhandi alias Jaro Ade dan pasangan Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman alias Kang Mus. (*)





PODCAST POLITIK ASYIK DI CIREBON

BICARA politik khususnya perhelatan Pilkada Serentak 2024 bukan sebuah hal yang membosankan. Asal, dengan sebuah inovasi unik.

Tengok saja yang diluncurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon. Melalui sebuah tayangan *podcast*, berbagai isu seputar Pilkada Serentak 2024 menjadi lebih ‘renyah’ untuk dikonsumsi masyarakat luas.

Menurut kamus *Miriam-Webster online podcast* sebuah program (seperti musik dan pembicaraan atau diskusi) yang tersedia dalam format digital yang bisa disaksikan atau diunduh secara otomatis melalui internet.

Program seperti ini sudah begitu menjamur di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan Platform YouTube dalam beberapa tahun terakhir.

KPU Kabupaten Cirebon rupanya

menangkap sebuah peluang unik di balik tayangan *podcast* yang mereka luncurkan. Sebuah peluang besar, untuk meningkatkan partisipasi jumlah pemilih pada Pilkada mendatang melalui sebuah inovasi yang sedang digandrungi masyarakat.

Podcast yang digagas KPU Kabupaten Cirebon diresmikan pada Selasa (8/10) lalu. Acara dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, Ketua Divisi SDM & Litbang KPU Jawa Barat Abdullah Sapi'i, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat dan perwakilan Polresta Cirebon.

Selain itu, perwakilan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-

Kabupaten Cirebon turut hadir dalam momen bersejarah ini.

Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni, mengapresiasi inisiatif KPU Kabupaten Cirebon dalam meluncurkan *podcast* ini.

“Ini adalah bentuk inovasi yang luar biasa, mendekatkan masyarakat dengan penyelenggara pemilu melalui pendidikan pemilih yang lebih interaktif. *Podcast* ini membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan dan dinamika pemilu secara langsung,” ujar Ummi.

Podcast KPU Kabupaten Cirebon ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Melalui kanal YouTube resmi, masyarakat dapat mengikuti pembahasan mendalam, tak hanya mengenai tahapan formal pemilu, tetapi juga berbagai isu lokal yang relevan.

“Tujuannya agar masyarakat Kabupaten Cirebon mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait perkembangan politik di daerahnya,” tambah Ummi.

Inovasi serupa memang telah diadopsi oleh beberapa KPU di kabupaten/kota lain di Jawa Barat, namun KPU Kabupaten Cirebon menjadi salah satu yang terdepan dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan nyaman untuk

pembicara serta narasumber *podcast*.

“Studionya nyaman dan estetik. Kami berharap sosialisasi pemilu dapat lebih luas menjangkau masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses demokrasi yang sedang berlangsung melalui sarana *podcast*,” jelasnya.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, juga menegaskan bahwa *podcast* ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada mendatang.

“Podcast ini akan membahas berbagai hal terkait tahapan Pilkada, termasuk situasi politik lokal yang penting untuk dipahami masyarakat,” tutur Esya didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Masyhuri Abdul Wahid.

DPT di Kabupaten Cirebon

Peluncuran *podcast* jadi satu dari sekian banyak inovasi sosialisasi Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon. Langkah-langkah strategis menjadi harga mati demi mencapai target partisipasi pemilih.

Pada 20 September 2024 lalu, KPU Kabupaten Cirebon telah merilis jumlah DPT melalui rapat pleno.

“Total DPT sebanyak 1.744.235 orang. Kami pastikan, data pemilih yang sudah ditetapkan ini, sudah akurat dan valid,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati.

Menurut Esya, dari total DPT yang sudah ditetapkan tersebut, 880.707 merupakan pemilih laki-laki. Sedangkan sisanya yaitu 863.528, merupakan pemilih perempuan.

Semua data yang ditetapkan ini su-



dah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran. Sehingga Esya memastikan, nama yang tercantum bisa menggunakan hak pilihnya.

Esya menjelaskan dalam proses verifikasi data pemilih, KPU melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna memastikan proses tersebut berjalan dengan baik sesuai regulasi yang ada.

Selain itu, pihaknya menjamin pemilihan pemula di Kabupaten Cirebon, terutama mereka yang baru berusia 17 tahun bisa menyalurkan hak pilih di TPS.

“Seluruh data, sudah dilakukan verifikasi dan pemutakhiran,” kata Esya.

Sedangkan untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Cirebon, Esya menyebut terdapat sebanyak 3.316 TPS. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak dua TPS yang masuk kategori khusus, yang berada di Lembaga Pemasarakatan. Menurut Esya ada sebanyak 852 pemilih di Lapas.

“Kami berharap, pada waktu pemilihan nanti, partisipasi pemilih bisa mencapai 80%,” kata dia.

Pertarungan 4 Paslon

Di sisi lain, kontestasi Pilkada atau Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Cirebon 2024 telah resmi mengelat pertarungan empat pasangan calon (paslon).

Keempat paslon itu telah ditetapkan untuk bertarung di Pilkada Serentak 2024 oleh KPU Kabupaten Cirebon, Minggu 22 September 2024 lalu.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Kurnia Puspawati, menjelaskan proses penetapan berlangsung sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

“Kami telah melaksanakan rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPU dan staf,” ungkapnya.

Keempat pasangan calon yang ditetapkan berasal dari latar belakang beragam dan diusung oleh koalisi partai besar.

D antaranya, Imron-Agus Kurniawan Budiman, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem.

Kemudian, Wahyu Tjiptaningsih-Solihin, diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Lalu Mohamad Luthfi-Dia Ramayana, didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Pasangan terakhir, Rahmat Hidayat dan Imam Saputra, mendapat dukungan dari koalisi besar yang mencakup Partai Buruh, Partai Gelora, dan beberapa partai lainnya.

“Keempat pasangan ini resmi ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon,” tegas Esya. (*)





SEKEJAP PAHAM SIREKAP

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumumkan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Kadiv Data dan Informasi KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang bertujuan untuk mempermudah rekapitulasi penghitungan suara, baik untuk masyarakat maupun KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sirekap menggantikan sistem informasi penghitungan suara sebelumnya yang dikenal sebagai Situng, yang digunakan pada pemilihan umum 2019.

Meskipun Sirekap telah diterapkan

pada Pilkada 2020 dengan beberapa kekurangan yang masih diperbaiki, Ahmad menekankan bahwa KPU berperan sebagai admin atau operator dalam sistem ini.

Perlu diketahui, sistem Sirekap terdiri dari tiga komponen, yakni:

Sirekap Mobile: Digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan perangkat Android. KPPS akan memotret hasil pemungutan suara, dan foto tersebut akan diproses dalam aplikasi Sirekap.

Sirekap Web: Digunakan untuk rekapitulasi dan sebagai alat bantu bagi KPU dalam penghitungan suara. Sistem ini memungkinkan hasil pemungutan suara ditampilkan secara real-time, sehingga mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya panjang.

Sirekap Offline: Diterapkan di daerah yang tidak memiliki akses internet. Data dapat diunggah dalam format PDF meskipun tanpa koneksi internet.

Ahmad juga mengungkapkan, pentingnya penyediaan akses internet



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

SIREKAP APA ITU?

JENIS

● Sirekap Mobile

Digunakan oleh KPPS untuk melakukan perhitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Fungsinya sebagai sumber data utama perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C.Hasil-KWK.

● Sirekap Versi Web

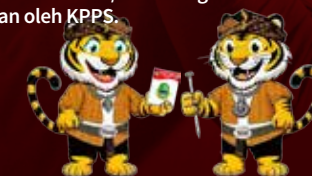
Digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota KPU di Kota/Kabupaten dan Provinsi. Fungsinya untuk menghimpun dan menjumlah seluruh sumber data utama.

FUNGSI

1. Membaca dan merekam Formulir C hasil penghitungan suara di TPS;
2. Melakukan penghitungan dan tabulasi data perolehan suara hasil Pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara;
3. Mengirimkan data hasil perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan tingkatan rekapitulasi suara, yakni dari KPPS ke PPK, dari PPK ke Kabupaten/Kota, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi;
4. Alat bantu untuk mencetak formulir sertifikat hasil perolehan suara di setiap tingkatan rekapitulasi;
5. Mempublikasikan setiap perolehan suara hasil Pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang.

CARA KERJA

1. Petugas KPPS menginstal aplikasi Sirekap pada smartphone masing-masing.
2. Lalu, login menggunakan akun yang sudah didaftarkan pada aplikasi Sirekap.
3. Petugas KPPS menghitung hasil perolehan suara dan menuliskan hasilnya pada Formulir C.Hasil-KWK.
4. Selanjutnya, petugas KPPS melakukan pemotretan terhadap Formulir C.Hasil-KWK yang sudah terisi.
5. Aplikasi Sirekap menampilkan hasil pembacaan OCR/OMR. KPPS memeriksa hasil pembacaan tersebut serta memastikannya sesuai dengan Formulir C.Hasil-KWK.
6. Setelah itu, KPPS mengirimkan foto dokumen dan hasil pembacaan OCR/OMR pada saksi dan pengawas yang sudah terdaftar, berupa link atau barcode yang tersedia dalam aplikasi Sirekap.
7. Saksi dan pengawas menerima foto dan hasil pembacaan OCR/OMR dengan cara scan barcode atau mengunjungi link yang diberikan oleh KPPS.



yang memadai untuk penggunaan Sirekap.

“Pengguna akan mendapatkan akun dengan username dan password sebelum melakukan unggahan data. KPU Jabar telah memastikan bahwa sistem ini aman dan siap digunakan,” ujarnya.

Sebagai langkah persiapan, KPU Jabar akan mengadakan sosialisasi dan

bimbingan teknis untuk KPU Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat pada tanggal 25-29 Oktober 2024.

Dengan adanya Sirekap, diharapkan transparansi dan akurasi dalam penghitungan suara dapat meningkat, memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam proses demokrasi ini. (*)

POLITIK DALAM GENGGAHAN

KITA sudah tidak lagi berada di zaman dimana untuk mengenal calon pemimpin harus rela ikut kampanye naik di bak mobil truk atau menghadiri tablig akbar di alun-alun kota. Kini, semua hal tentang si calon pemimpin ada dalam genggaman tangan.

Politik telah bergeser dari sisi perilaku para calon pemimpin ataupun masyarakat yang jadi pemegang hak suara. Perkembangan teknologi digital yang memegang peranan besar di balik pergeseran itu.

Dengan digitalisasi khususnya penggunaan media sosial yang masif, masyarakat beranjak lebih cerdas dan punya wawasan luas dalam menentukan pilihan pada setiap kontestasi politik.

Chadwick dan Howard dalam bukunya *Routledge Handbook of Internet Politics* menyatakan bahwa internet (media sosial) telah berevolusi menjadi media yang mendasari sistem komunikasi politik masyarakat (Chadwick & Howard, 2009).

Semua data-data tentang rekam jejak calon pemimpin berseliweran di platform media sosial ataupun mesin pencari semisal *Google*. Entah itu positif, ataupun konten-konten negatif yang tak terelakan seiring perkembangan teknologi digital yang begitu cepat dan masif.

Tapi yang terpenting, masyarakat menjadi mudah mencari informasi. Semua ada dalam perangkat yang selalu kita genggam dengan tangan (gadget).

Lantas, jelang perhelatan Pilkada Serentak 2024 yang tinggal hitungan bulan, adakah tips-tips khusus terkait penggunaan media sosial ataupun

internet dalam menentukan pilihan kepada salah satu paslon tertentu?

Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo menyebut ada tiga kiat yang bisa dijadikan bahan referensi bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin pada kontestasi Pilkada serentak 2024 di era digital saat ini.

Pertama atau yang paling utama adalah memperhatikan rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih. Tentu ini sebuah hal yang teramat mudah untuk dilakukan. Bisa dengan mencari data-data si paslon via mesin pencari, ataupun langsung berselancar ke akun media sosial salah satu calon itu sendiri.

Menelusuri rekam jejak calon pemimpin jadi hal wajib. Tentu saja, patut juga diiringi dengan kemauan meluangkan waktu lebih untuk memilih sumber-sumber kredibel yang menayangkan rekam jejak mereka.

“Hal itu terkait pula dengan kapabilitas, kompetensi, dan juga

pengalaman sebelumnya yang itu tentu sangat berguna untuk pemerintahan ke depan,” kata Wasisto.

Jejak digital adalah hal kedua yang harus dilihat bagi para pemilik suara, sebab dalam kemajuan teknologi saat ini, jejak digital bisa menjadi preferensi alternatif atau kemungkinan prioritas atau kecenderungan yang kadang sangat menentukan.

“Sangat penting melihat rekam jejak digital masa lalu bagi calon pemimpin, sehingga pemilik suara memiliki gambaran tentang cara berpikir dan kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh orang yang akan dipilih nanti,” katanya.

Ketiga adalah kedekatan calon dalam pilkada dengan masyarakat. Poin ketiga itu juga faktor penting khususnya bagi para pemilih pemula atau anak muda.

Kemiripan latar belakang seperti pekerjaan, aktivitas sosial dan media sosial, serta lainnya akan menandakan adanya hubungan emosional tidak langsung, hubungan kekerabatan atau hubungan lain yang bisa membuat pemilik suara merasa terwakili.

“Jadi memang inilah yang saya pikir bagi di daerah manapun secara umum menjadi faktor yang paling determinan atau menentukan,” ujar dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Anggota KPU RI August Mellaz menjelaskan hal tersebut merupakan rekapitulasi data usai penetapan pasangan calon kepala daerah dilakukan KPU masing-masing wilayah pada 22 September 2024 lalu. (*)



Seperti diketahui, Jabar merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, diperkirakan memiliki lebih dari 30 juta pemilih.

Dengan populasi yang beragam, Pilkada di Jabar akan menjadi salah satu tolak ukur bagi keberhasilan demokrasi di tingkat nasional.

Untuk itu, tingginya jumlah pemilih menjadikan Jabar sebagai medan tempur bagi calon gubernur dan wakil gubernur, serta partai politik yang bersaing.

Pada Pilkada serentak 2024 ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar diikuti oleh empat pasangan calon, yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhul-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

Maka penting bagi keempat pasangan calon untuk melaporkan dana kampanye. Dimana pelaporan dana kampanye merupakan alat vital dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas.

Masyarakat berhak mengetahui dari mana dana kampanye berasal dan bagaimana penggunaannya. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kita dapat bersama-sama mendorong terciptanya iklim politik yang lebih sehat dan demokratis.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan ditetapkan pasangan calon pada 22 September 2024.

Dalam penetapan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024, sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar melaksanakan rapat pleno tertutup yang hanya dihadiri oleh internal KPU.

Usai penetapan calon kepala daerah, selanjutnya KPU akan menggelar pengundian nomor urut pasangan calon dengan mengundang seluruh pasangan calon bersama tim terbatas.

Adapun untuk teknis pengundian nomor urut akan dilakukan di Kantor KPU. Namun, jika tidak memungkinkan

ANTARA DANA KAMPANYE DAN INTEGRITAS



Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam demokrasi, pelaporan dana kampanye menjadi sorotan utama. Apalagi di kancah pertempuran di Provinsi Jawa Barat.

Oleh: Adi Saputro

Komisioner KPU Jawa Barat

pengundian nomor urut pasangan calon maka bisa mengajukan untuk digelar di luar kantor KPU.

Hingga saat ini, diketahui sudah ada beberapa Kabupaten/Kota di Jabar yang mengajukan pengundian nomor urut pasangan calon di luar kantor KPU.

KPU Jabar juga mengimbau kepada seluruh Paslon untuk mengikuti aturan dari seluruh tahapan Pilkada.

Seluruh Paslon diwajibkan memedomani peraturan yang berlaku, baik itu undang-undang pilkada, peraturan KPU dan Keputusan KPU RI.

Dimana ke depannya, Paslon yang telah ditetapkan akan melaksanakan tiga tahapan kampanye, yakni kampanye, laporan dana kampanye hingga pemungutan suara.

Adapun pelaksanaan kampanye dimulai pada 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara rencananya digelar pada 27 November 2024. Dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dijadwalkan pada 27 November – 16 Desember 2024.***



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Gemilang
#GembiraMemilihLangsung



27
KPU Jawa Barat
2024

**SiliWangi
Pedia**

GUNAKAN HAK PILIHMU!

**Jangan biarkan
suaramu hilang.**

Setiap Suara Sangat Berarti.
Suaramu menentukan daerahmu.

Semakin banyak
yang memilih,
**semakin kuat
suara rakyat.**



jabar.kpu.go.id



[kpuprovinsijabar](https://www.instagram.com/kpuprovinsijabar)



[KpuProvJabar](https://www.facebook.com/KpuProvJabar)



[kpu_provjabar](https://twitter.com/kpu_provjabar)



[KPU Provinsi Jawa Barat](https://www.youtube.com/KPUProvinsiJawaBarat)